

PELAKSANAAN UNSUR URUSAN PEMERINTAHAN
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SULAWESI BARAT

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun.	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen perencanaan strategi dan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat.	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran RKA SKPD.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	Jumlah dokumen penyusunan dan penganggaran perubahan RKA-P.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah.	3 Dokumen	3 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang digaji dan diberikan tunjangan ASN.	38 Org	38 Org	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.</i>	<i>Jumlah dokumen kepegawaian perangkat daerah.</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	78 Org	71 Org	Tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan adanya pengurangan anggaran.	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah.</i>	<i>Jumlah dokumen umum perangkat daerah.</i>	5 Dokumen	5 Dokumen	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD</i>
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah kotak makan minum rapat dan tamu.	1500 kotak	1500 kotak	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah lembar fotocopy dan spanduk baliho.	5.000 lembar fotocopy & spanduk baliho.	5.000 lembar fotocopy & spanduk baliho.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Bahan / Material.	Jumlah penyediaan bahan material (Atk Kantor).	25 Macam	25 Macam	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyelenggaraan Rapat.	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	75 Org	75 Org	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah operator SPBE	3 Org	3 Org	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</i>	<i>Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.</i>	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	1 Uniit Mobil	1 Uniit Mobil	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</i>	<i>Persentase penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan daerah.</i>	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah PTT yang dibayarkan gajinya dan Jumlah surat masuk keluar.	33 Org	33 Org	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah pembayaran bulan rekening telepon, air dan listrik.	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</i>	<i>Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.</i>	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya.	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	12 Bulan	12 Bulan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Peningkatan Ideologi Pancasila.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI, PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</i>	<i>Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter.</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada</i>	<i>Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD</i>

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pembentukan Paskibraka.	Jumlah pembentukan paskibraka, pelaksanaan tugas paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas paskibraka duta pancasila, pembinaan terhadap aktifitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka, pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pan.	1 Provinsi & 6 Kabupaten	1 Provinsi & 6 Kabupaten	Masih kurang edukasi serta kegiatan yang mendukung penguatan pancasila serta wawasan kebangsaan	Telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke BPIP dan melakukan telaahan staf kepada pimpinan untuk mengadakan kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Tingkat perkembangan Parpol yang diverifikasi, Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Persentase kabupaten yang dipantau dalam pelaksanaan Pemiluakada.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Peran Partai Politik & Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik & Pengembangan etika serta Budaya Politik.	90%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Hasil Politik.</i>	<i>Jumlah dokumen terkait meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Mengikuti pesta Demokrasi.</i>	4 Dokumen	4 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	<i>Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD</i>
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen penyusunan bahan perumusan kebijakan aktivitas Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan (aktivitas).	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	2 Dokumen	2 Dokumen	Adanya kenaikan suara dalam setiap Partai Politik Periode Tahun 2019-2024 ke Periode Tahun 2024 -2029	Telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Tim TAPD (BPKPD) terkait ttg tambahan anggaran Bantuan Keuangan Parpol.	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	2 Dokumen	2 Dokumen	Kurangnya anggaran pada Kegiatan Desk Pilkada Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.	Telah melakukan koordinasi dan konsultasi ke Tim TAPD (BPKPD) terkait tentang penambahan anggaran Desk Pilkada.	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
			Peningkatan norma budaya kearifan lokal.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terumus.	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah dokumen laporan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang tersusun.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitas Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang terevaluasi.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peningkatan waspada dini, deteksi dini dan cegah dini lingkup Provinsi Sulawesi Barat.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.	Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan kondisi waspada nasional, kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial.	90%	90%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.	Jumlah dokumen laporan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang terumus.	6 Dokumen	6 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	2 Dokumen	2 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik.	1 Dokumen	1 Dokumen	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi.	Jumlah dokumen laporan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang terlaksana.	1 Dokumen	1 Dokumen	Adanya pengajuan tambahan anggaran Hibah Polda terkait tentang pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	Telah dilakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pimpinan Gubernur dan Tim TAPD terkait hal tersebut.	Tidak Ada Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Mamuju, 3 Februari 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Barat

Drs. H. HERDIN ISMAIL, M.M
Pangkat : Pembina Utama Madya / IV.d
NIP : 19700701 199101 1 004